

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah kemiskinan. Chambers dalam (Nasikun, 2001) mengatakan bahwa kemiskinan memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi isu sosial penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah, sehingga pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan untuk mengatasinya. Walaupun pada kenyataannya upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terbukti dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yang masih tergolong cukup tinggi.

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 sebesar 9,41 persen, hal ini terjadi penurunan sebesar 0,25 persen terhadap bulan September tahun 2018 dan menurun 0,41 persen terhadap bulan Maret tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Persentase penduduk miskin yang cukup tinggi di tingkat nasional didukung oleh persentase penduduk miskin di tingkat provinsi. Provinsi dengan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-3 di pulau Jawa dengan nilai sebesar 6,91 persen berdasarkan data Publikasi Statistik yang dirilis oleh BPS per Maret tahun 2019.

Persentase yang cukup tinggi untuk penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat diduga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor pengaruh wilayah ataupun faktor-faktor penduga lainnya. Faktor-faktor penduga tersebut perlu diketahui agar pemerintah dapat membuat suatu kebijakan publik yang tepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota yang saling berdekatan dan memiliki kemiripan karakteristik antar wilayahnya. Sehingga wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat diduga memiliki keterkaitan secara spasial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Alvitiani, Yasin, & Mukid, 2019) mengatakan bahwa faktor kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tertentu tidak hanya disebabkan oleh daerah yang bersangkutan saja melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan di daerah lainnya. Selain itu, pada jurnal geografi yang dibuat oleh (Listyaningsih, 2018) menyebutkan bahwa karakteristik sosial ekonomi di masyarakat erat kaitannya dengan karakteristik wilayah. Berdasarkan uraian tersebut, maka tingkat kemiskinan di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat diduga cenderung memiliki kemiripan, sehingga data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat diduga memiliki efek spasial.

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Barat dapat diketahui berdasarkan suatu metode tertentu. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan kabupaten/kota dan dalam periode waktu tertentu dengan efek spasial di dalamnya adalah metode analisis regresi spasial data panel. Regresi spasial data panel digunakan untuk menganalisis data yang mengandung unsur spasial dan melibatkan gabungan antara data lintas individu dengan data lintas waktu. Regresi spasial data panel penting digunakan pada jenis data gabungan antara lintas individu dan lintas waktu yang memiliki efek spasial karena apabila analisis hanya menggunakan analisis regresi klasik maka analisis akan mengindikasikan ketidakakuratan (Anselin, 2009).

Model regresi spasial data panel memiliki efek spasial *lag* pada peubah respon atau memiliki efek spasial pada *error*. Model spasial ini lebih dikenal dengan sebutan *Spatial Autoregressive Model* (SAR) untuk *lag* model dan *Spatial Error Model* (SEM) untuk *error* model (J. Elhorst, 2010). Fokus utama pada *lag* model spasial berhubungan dengan korelasi atau hubungan spasial pada peubah respon, sedangkan untuk model *error* spasial terfokus pada sisaaan atau sering disebut dengan residual (Anselin, 2009). Regresi spasial data panel digunakan untuk menganalisis suatu data spasial yang tidak hanya melibatkan data lintas

individu atau data yang dikumpulkan dari beberapa periode waktu tertentu saja, melainkan keduanya. Data dengan penggabungan keduanya disebut juga dengan data panel.

Data panel merupakan data gabungan antara data lintas individu (*cross-section*) dan data dari beberapa periode waktu tertentu (*time series*). Data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan hanya menggunakan data lintas individu atau data runtun waktu saja. Hsiao dan Klevmarken menyebutkan beberapa manfaat dari penggunaan data panel, diantaranya yaitu: 1) mengontrol heterogenitas individu, 2) memberikan data yang lebih informatif dan juga lebih efisien, 3) lebih mampu menyesuaikan perubahan yang dinamis, 4) lebih mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi dalam data cross section atau data time series saja, 5) memungkinkan pembuatan dan menguji model yang lebih rumit daripada data cross section atau time series saja, 6) bias yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan dapat diminimalkan karena data lebih banyak (Baltagi, 2005).

Data panel memiliki tiga pendekatan untuk memodelkan data. Model pertama adalah *Common Effect Model* (CEM). *Common Effect Model* merupakan model yang paling dasar dalam regresi data panel dan sering disebut dengan model pengaruh gabungan. Model kedua yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) atau sering disebut dengan model pengaruh tetap. Model terakhir yaitu *Random Effect Model* (REM) atau disebut juga dengan model pengaruh acak.

Beberapa topik penelitian sebelumnya yang terfokus pada metode regresi spasial data panel diantaranya yaitu penelitian dari (Setiawati & Setiawan, 2012) yang memodelkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dengan hasil model *SEM fixed effect* sebagai model terbaik. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Hikmah, 2017) yaitu pemodelan spasial data kemiskinan di Provinsi Papua dengan hasil model *SAR fixed effect* sebagai model terbaik. Topik penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Tamara, Ispriyanti, & Prahutama, 2016) yang membuat model spasial data panel menggunakan GUI Matlab dengan hasil jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Alvitiani et al., 2019) yang memodelkan data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan fixed effect spatial durbin model dengan hasil usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Y. Sari, Wigena, & Rizki, 2020) yang membandingkan penggunaan matriks pada analisis spasial data panel kemiskinan di Sumatera Selatan dengan hasil jumlah penduduk dan usia harapan hidup mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan dari fenomena kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat, penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode regresi spasial data panel untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model regresi spasial data panel untuk data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menggunakan model regresi spasial data panel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membentuk model regresi spasial data panel dari data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menggunakan model regresi spasial data panel.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan wilayah lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Jawa Barat, sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik untuk mengatasi kemiskinan.

